

PENGARUH KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASEAN PADA TAHUN 2021

Fadhlan Nur Hakiem, Annisa Febrianti Putri Indrasari, & Tania Amelinda Hasanah
Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: Fadhlan.nur@fisip.unsika.ac.id, 2110631260055@student.unsika.ac.id, & 2110631260043@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana jalan keluar dari permasalahan kudeta militer Myanmar terutama sesama Negara anggota di dalam suatu Kawasan ditinjau dari ada atau tidaknya pergolakan dari berbagai aspek seperti: sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanannya. Kejadian pada Februari 2021 lalu, tercatat sebagai kudeta kedua yang terjadi di Myanmar. Dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, ASEAN agaknya sulit keluar dari prinsip non-interference yang mana krisis politik yang terjadi di salah satu negara ASEAN menjadi urusan dalam negeri negara yang bersangkutan. ASEAN harus bersikap lebih lembut untuk mengintervensi dan memberikan tekanan melalui sikap tegas seperti ancaman mengeluarkan Myanmar dari ASEAN apabila pemimpin militer tidak bersedia mengakhiri kudeta. Hal itu menjadi tantangan ASEAN, karena stabilitas di wilayah ASEAN akan semakin terganggu apabila penolakan terhadap rekonsiliasi tidak dapat dilakukan di kemudian hari. Penelitian ini akan mengaplikasikan Pendekatan Keamanan Regional dan Pendekatan Human Security yang dirasa tepat untuk diaplikasikan ke dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan metode library research. Penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh kudeta militer Myanmar terhadap stabilitas Kawasan ASEAN semakin terasa adanya. ASEAN harus mempelajari bagaimana menerapkan konsep non-intervensi secara lebih fleksibel terhadap isu Myanmar.

Kata kunci: Kudeta militer, Myanmar, Stabilitas Kawasan, ASEAN, Human Security

ABSTRACT

This study aims to find out how to get out of the problem of the Myanmar military coup, especially fellow member states in a region in terms of the presence or absence of upheaval from various aspects such as social, economic, political, defense and security. The incident in February 2021 was recorded as the second coup that occurred in Myanmar. In responding to the political crisis that occurred in Myanmar, ASEAN seems to find it difficult to get out of the principle of non-interference, where the political crisis that occurred in one of the ASEAN countries became the internal affairs of the country concerned. ASEAN must be gentler to intervene and exert pressure through a heartfelt attitude such as the threat of removing Myanmar from ASEAN if the military leader is not willing to end the coup. This is a challenge for ASEAN because stability in the ASEAN region will be further disrupted if the rejection of reconciliation cannot be carried out in the future. This research will apply the Regional Security Approach and the Human Security Approach which is considered appropriate to be applied to this research. The method used in writing this journal is descriptive qualitative with the data collection technique using the library research method. Research shows that the influence of Myanmar's military coup on the stability of the ASEAN Region is increasingly felt. ASEAN must learn how to apply the concept of non-intervention more flexibly to the Myanmar issue.

Keywords: Military Overthrow, Myanmar, Regional Stability, ASEAN, Human Security

PENDAHULUAN

Myanmar adalah salah satu negara yang belum menjalankan pemerintahan demokratis di Asia Tenggara sampai tahun 2011 (R.Mirajiah, 2013). Kemudian setelah itu, beralih ketika reformasi demokrasi yang dipimpin oleh Suu Kyi mengakhiri kekuasaan militer. Sejatinya, perjalanan menegakkan demokrasi di Myanmar mengalami jatuh bangun dan pasang surut sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1948. Kejadian pada Februari 2021 lalu, tercatat sebagai kudeta kedua yang terjadi di Myanmar. Karena sebelumnya, peristiwa serupa terjadi pada tahun 1962 (Alauddin, 2021). Transisi kekuasaan dari pemerintahan militer yang ditandai dengan kemenangan sipil pada pemilu 2010 seharusnya menumbuhkan cita dan asa lahirnya demokratisasi di kawasan ASEAN, namun sangat disayangkan justru hancur lebur satu dekade kemudian.

Junta militer Myanmar melancarkan kudeta dan menangkap pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta beberapa petinggi lain dari kekuasaan nasional Myanmar. Motif yang melatarbelakangi terjadinya penggulingan kekuasaan tersebut adalah para junta militer yang tidak terima dan menolak hasil keputusan pemilihan umum dengan dugaan kecurangan. Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar dan para pengamat internasional yang terjun langsung menegaskan tuduhan itu tidak benar, namun kudeta tetap saja terjadi. Tak sampai disitu, kudeta juga diikuti oleh tindakan yang tidak berperikemanusiaan dari junta militer kepada rakyat Myanmar (Alauddin, 2021).

Sejak akhir Maret 2021, orang-orang telah mengambil senjata buatan sendiri, termasuk ketapel, senapan angin, dan senjata api, untuk melawan junta militer sebagai tanggapan atas pembunuhan pengunjuk rasa anti-rezim yang damai di seluruh negeri. Rezim kemudian meningkatkan kekejaman di kubu perlawanan, termasuk penangkapan sewenang-wenang, membunuh warga sipil, eksekusi di luar hukum, menembaki daerah pemukiman, menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan menjarah serta membakar rumah hampir setiap hari (The Irrawaddy, 2022). Sudah tidak terhitung berapa ratus bahkan sampai ribuan nyawa terenggut sia-sia karena kudeta militer di Myanmar tersebut. Penelitian ini tidak dapat memverifikasi angka-angka korban secara independen.

Secara pertumbuhan ekonomi, Myanmar memang bisa dikatakan cukup rendah, namun Myanmar tidak bisa diremehkan begitu saja. Negeri Pagoda Emas itu memiliki kekuatan bersenjata yang sangat kuat bahkan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara

(Ariyanti, 2021). Namun pemerintahan militer Myanmar ini tidak mencerminkan kehidupan Negara madani sebagaimana mestinya. Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan (adminpublik, 2021). Dalam menjalankan pemerintahannya, Myanmar menutup rapat-rapat akses dan mengisolasi diri dari pihak asing. Selain itu Pemerintah militer menerapkan ideologi sosialisme sebagai dasar politik dan ekonomi, menghapus semua partai oposisi yang ada di negaranya dan hanya mengakui satu partai politik yang bernama Partai Lenzin dengan mayoritas anggotanya dari golongan militer (Batubara, 2017).

Salah satu alasan ekonomi Myanmar ini terpuruk adalah embargo-embargo yang dilayangkan oleh pihak internasional terhadap Myanmar dikarenakan kekacauan yang telah dibuat oleh para militer. Hal ini sudah pasti berimbas kepada kesejahteraan rakyat (Tim BBC News Indonesia, 2021). ASEAN memiliki ekonomi pasar terbesar ketiga di kawasan Indo Pasifik dan kelima terbesar di dunia dengan kue GDP lebih dari US\$ 2,8 triliun di tahun 2018 jika ditinjau secara makro. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan Australia, India, Taiwan, dan Korea Selatan. Sehingga keamanan regional pasti berdampak besar pada stabilitas pasar. Apa yang hari ini terjadi di Myanmar secara geopolitik merupakan ancaman bagi pertumbuhan GDP dan neraca dagang di lingkup kawasan ASEAN (Alauddin, 2021).

Dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, ASEAN agaknya sulit keluar dari prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Salah satu prinsip yang dipegang teguh ketika terjadi krisis politik di salah satu negara anggota ASEAN adalah prinsip non-intervensi (Hidriyah, 2021). Ini artinya, krisis politik yang terjadi di salah satu negara ASEAN menjadi urusan dalam negeri negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, intervensi dari negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa dibenarkan. Intervensi di sini lebih diartikan sebagai ikut campur mengurus urusan dalam negeri negara lain tanpa diminta oleh negara yang bersangkutan.

Intervensi ASEAN juga belum tentu bisa langsung diterima terutama ketika eksistensi bibit-bibit militer masih mendominasi politik negara Myanmar. ASEAN harus

bersikap lebih lembut untuk mengintervensi dan memberikan tekanan melalui sikap tegas seperti ancaman mengeluarkan Myanmar dari ASEAN apabila pemimpin militer tidak bersedia mengakhiri kudeta (Hidriyah, 2021). Hal itu menjadi tantangan ASEAN, karena stabilitas di wilayah ASEAN akan semakin terganggu apabila penolakan terhadap rekonsiliasi tidak dapat dilakukan di kemudian hari.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan ingin melakukan pembaharuan dengan melihat sejauh mana pengaruh dari konflik keamanan regional terhadap ancaman militer dan *human security* mempengaruhi kawasan. Dalam konteks ini adalah bagaimana pengaruh kudeta militer di Myanmar terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Penelitian ini pun bertujuan untuk mencari tahu bagaimana jalan keluar dari permasalahan kudeta militer Myanmar terutama dampaknya terhadap sesama Negara anggota di dalam suatu kawasan. Ditinjau dari ada atau tidaknya pergolakan dari berbagai aspek seperti: sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanannya.

KERANGKA ANALISIS

Keamanan Regional

Penelitian ini akan mengaplikasikan pendekatan Keamanan Regional yang dikemukakan oleh John Baylis dalam "*International and Global Security in the Post-Cold War Area*". Keamanan regional (*Regional Security*) merupakan suatu kondisi Kawasan yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang dipersepsikan oleh negara-negara di dalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman di dalam kawasannya. Oleh karena itu, keamanan regional akan terdiri dari keamanan semua aktor (negara) di dalamnya (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). Dengan kata lain, keamanan regional adalah *resultant* dari kumpulan keamanan nasional para aktornya dan keamanan nasional para aktornya juga merupakan *resultant* dari keamanan setiap *referent object* masing-masing negara (*military sector, political sector, economic sector, societal sector, environment sector, atau survival of human civilization*).

Pendekatan ini dirasa tepat untuk diaplikasikan ke dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut apakah ada perasaan ketakutan ASEAN terhadap keberadaan ancaman (dalam hal ini kudeta militer Myanmar) di dalam kawasannya. Hal ini sesuai dengan pengertian Keamanan Regional (*Regional Security*) yang sudah dipaparkan diatas.

Keamanan Manusia

Pendekatan lain yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan Keamanan Manusia (*Human Security*). Keamanan Manusia (*Human Security*) merupakan salah satu konsep yang problematis, khususnya tatkala dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda. Konsep *Human Security* sudah berkembang sejak didirikannya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*), pada tahun 1896. Lalu, konsep ini disahkan melalui “Piagam PBB” pada 1945 yang disusul oleh “Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia pada tahun 1948” (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).

Persoalan *Human Security* dalam Kudeta Militer Myanmar yang mana adalah terjadinya bentrokan antara warga sipil dan militer harus segera diatasi dengan cara-cara yang tepat, karena jika tidak hal tersebut dapat melemahkan sumber daya manusia yang ada. Persoalan domestik ini juga turut akan meningkatkan berbagai ancaman *Human Security* yang berdampak lintas batas (transnasional). Mengingat ancaman kontemporer terhadap *Human Security* yang tidak mengenal batas-batas teritorial (transnasionalisasi ancaman), maka dalam upaya menangani berbagai ancaman terhadap *Human Security* perlu meningkatkan kerja sama antarnegara dan antar aparat negara maupun aktor-aktor nonnegara, seperti masyarakat, INGO/NGO, akademisi, serta organisasi regional dan internasional dalam merumuskan strategi keamanan secara global, baik itu di lingkup domestik, regional, maupun di lingkup internasional (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga mengkaji mengenai respon negara ASEAN lain terhadap Kudeta Militer Myanmar dan juga solusi yang ditawarkan ASEAN sebagai organisasi regional terhadap problematika *Human Security* yang terjadi saat Kudeta Militer di Myanmar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2005:4), metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dimana data-data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut juga dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumentasi

pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Penelitian ini berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode *library research*, yaitu metode dengan pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, media massa, laporan Lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan lain sebagainya. Kegiatan penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data *Library Research* ini kemudian dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/Teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Penyebab terjadinya Kudeta Militer di Myanmar 2021

Senin, 1 Februari 2021, Myanmar kembali mengalami kudeta untuk yang kesekian kalinya. Kudeta ini terjadi akibat klaim dari militer yang menganggap adanya kecurangan dalam pemilu yang berlangsung pada November 2020. Meskipun komisi pemilihan menyebut tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, militer Myanmar dalam kudeta ini tetap mempertahankan pendapatnya dan menahan beberapa tokoh senior, seperti Presiden Myanmar Win Myint dan Aung Suu Kyi.

Kudeta berlanjut, dengan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar yang dipimpin oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Pengambilalihan ini terjadi lantaran militer Myanmar menganggap bahwa pemerintah gagal untuk menindaklanjuti kecurangan pemilu. Militer Myanmar juga menganggap pemerintah gagal untuk menunda pemilihan dikarenakan pandemi virus corona. Tindakan ini kemudian dipertahankan oleh militer Myanmar karena sesuai hukum dan konstitusi yang berlaku pengambilalihan boleh dilakukan pada saat-saat darurat (Garmabar, 2021). Setelah kudeta selesai dilakukan, Min Aung Hlaing mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa tindakan yang dilakukan militer itu benar dengan berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang adil. Dalam hal ini, militer Myanmar berspekulasi akan melakukan pemilihan yang adil dan bebas usai keadaan darurat selesai.

Tidak mendapat respon positif, kudeta ini ditentang banyak pihak yang mendukung demokrasi di Myanmar dan aksi demonstrasi pun dilakukan. Protes besar-besaran terjadi

setiap harinya untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Selain protes besar-besaran, aksi mogok massal juga dilakukan oleh ratusan buruh yang bekerja di pabrik pembuat suku cadang kendaraan militer Myanmar untuk menentang kudeta (isa/dea, 2021). Tak sedikit korban yang berjatuhan akibat kekerasan yang dilakukan pasukan Militer dalam kudeta Militer yang terjadi di Myanmar, dimulai dari kekejaman pasukan militer Myanmar yang telah membunuh para demonstran yang memprotes kudeta, sampai penahanan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer.

Meskipun begitu, para demonstran tak gentar dan tetap memenuhi jalan walaupun banyak terjadi kekerasan hingga puluhan orang tewas oleh militer Myanmar. Kelompok pemantau konflik juga menyebut bahwa peningkatan korban tewas adalah dampak dari pertempuran setelah warga sipil ikut angkat senjata. Kelompok-kelompok yang memerangi pasukan pemerintahan militer secara kolektif dikenal sebagai Angkatan Pertahanan Rakyat (*PDF*), sebuah jaringan dari kelompok sipil yang diikuti orang-orang dewasa muda (Soe Win & Stylianou, 2022). *PDF* memulai perjuangannya menggunakan ketapel dan dalam perkembangannya mereka juga membuat senapan serta bom rakitan.

Dalam kudeta militer yang terjadi di Myanmar ini, jika dibandingkan dengan *PDF*, jelas militer Myanmar memiliki keunggulan dan kekuasaan dari segala arah, seperti jaringan mata-mata yang tersebar, senjata canggih dengan daya tembak ke udara yang diperoleh dari negara-negara yang secara terang-terangan mendukung junta, yaitu Rusia dan China. Tak hanya itu, militer Myanmar juga diunggulkan karena memiliki kemampuan memutus jaringan telekomunikasi, serta pengalaman berperang dari konflik sipil di perbatasan negara.

Respon Negara ASEAN lain terhadap kudeta yang terjadi di Myanmar

Di level regional, suara ASEAN terpecah karena setiap negara anggota ASEAN memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi isu kudeta Myanmar. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina menganggap kudeta dan krisis di Myanmar sebagai urusan internal sehingga ASEAN tidak perlu melakukan intervensi. Sementara itu, Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengekspresikan keprihatinan yang mendalam atas pergolakan politik di Myanmar dan menyerukan pihak terkait untuk menahan diri serta menyelesaikan sengketa melalui dialog yang damai (KAPUR, 2022).

Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, anggota ASEAN yang paling demokratis, mengkritik kudeta itu, menyerukan pembebasan tahanan politik dan, akhirnya, mendorong agar Min Aung Hlaing diblokir dari KTT para pemimpin. Anggota lain, tanpa pemimpin yang benar-benar dipilih secara populer di antara mereka, menunda atau menentang pendekatan ini. Sementara negara-negara terpecah di sepanjang garis ini, mereka juga terbelah pada berbagai tingkat antara perlunya tindakan untuk menjaga kredibilitas ASEAN dalam menghadapi ketegaran junta dan kebutuhan untuk mempertahankan prinsip dasar organisasi tentang non-campur tangan dalam urusan internal anggota. Bahkan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura berhati-hati untuk menantang sila non-interferensi tersebut. Hal itu mereka lakukan, meskipun secara terbatas, menggarisbawahi betapa merusaknya mereka merasa perilaku junta Myanmar terhadap ASEAN.

Sebagai badan antar-negara daripada supranasional, dengan Sekretariat yang sengaja dibatasi dan preferensi untuk pengambilan keputusan berbasis konsensus, negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengandalkan tali panduan kelembagaan pada saat seperti ini. Sebaliknya, mereka harus menebusnya seiring berjalannya waktu, yang seringkali merupakan realitas diplomasi krisis (Bland, 2021).

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah termasuk yang paling sensitif terkait isu ini. Menggambarkan eksekusi itu sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang menunjukkan "junta membuat ejekan terhadap Konsensus Lima Poin". Malaysia telah menyarankan para pejabat SAC dilarang dari semua acara ASEAN daripada hanya KTT puncak, ASEAN perlu memiliki kerangka kerja yang memiliki permainan akhir dan menjabarkan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai permainan akhir itu. Permainan akhirnya adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis, makmur yang hak-hak sipil dan politiknya dijamin oleh Konstitusi (Staff Al Jazeera, 2022).

Pengaruh Kudeta Militer Myanmar terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN

Tak lama setelah kudeta terjadi, Sebagian besar warga sipil tewas akibat Tindakan pasukan keamanan dalam unjuk rasa. Dalam perkembangannya, peningkatan korban tewas adalah dampak dari pertempuran setelah warga sipil pun ikut angkat senjata. Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan kepada BBC bahwa dia setuju, konflik Myanmar yang sudah melibatkan warga sipil untuk ikut angkat senjata sudah bisa disebut sebagai perang saudara. Bachelet kemudian meminta Dewan Keamanan PBB mengambil

“Tindakan yang lebih agresif” untuk menekan militer agar pemulihan demokrasi di Myanmar dapat tercapai.

Selain itu, Bachelet juga berpendapat bahwa tanggapan dunia internasional atas krisis di Myanmar masih “kurang mendesak” dalam menggambarkan situasi Kudeta Militer di Myanmar sebagai sebuah “bencana”. Bachelet kemudian juga memperingatkan bahwa konflik di Myanmar kini mengancam stabilitas regional, yang dalam hal ini kawasan ASEAN (Soe Win & Stylianou, 2022).

ASEAN memiliki prioritas utama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan Asia Tenggara. Perhatian penting ASEAN adalah kesatuan, sentralitas, dan netralitas dari berbagai persaingan geopolitik negara-negara besar Kawasan dan bagaimana negara-negara Asia Tenggara beradaptasi dengan konteks keamanan Kawasan. Untuk menciptakan dan memelihara tatanan keamanan regional yang komprehensif, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi regional ASEAN menyikapi situasi politik dalam negeri Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021.

Negara-negara anggota ASEAN menanggapi kudeta Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 secara berbeda. Beberapa pemimpin ASEAN menyatakan keprihatinan dan meminta pihak menahan diri. Namun, ada pula yang menjaga jarak dan memilih menunggu situasi berkembang. Pemerintah Filipina, Kamboja, dan Thailand memandang kudeta militer di Myanmar sebagai masalah domestik dan tidak berkomentar lebih jauh, meskipun ketiganya pernah mengalami kudeta militer dan merasakan perjuangan untuk membentuk pemerintahan demokratis (Manurung, 2021). Menyoroti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri yang dikemukakan oleh negara-negara anggota ASEAN atas kudeta militer Myanmar, sangat disayangkan jika negara-negara anggota ASEAN menutup mata dan telinga untuk saling merangkul dan mengajak ASEAN untuk mengingat identitas bersama.

Dalam hal ini, kudeta militer Myanmar perlu dijadikan kekhawatiran mendalam, apalagi terkait implikasi kudeta politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar terhadap situasi pelaksanaan prinsip HAM di ranah politik regional. Hal semacam ini juga bisa menyebabkan semakin menguatnya praktik otoritarianisme di Kawasan Asia Tenggara (Damanik, 2021). Indikasinya mengarah kepada semakin menyempitnya ruang untuk peduli pada isu-isu HAM

dan demokrasi serta di sisi lain semakin maraknya praktik kekerasan dan diskriminasi. Situasi tersebut membuat negara-negara Kawasan Asia Tenggara rentan untuk diintervensi oleh kekuatan anti demokrasi dan HAM.

Tidak hanya itu, kudeta militer di Myanmar dalam stabilitas Kawasan regional tengah diuji dengan bobot diplomatik aliansi (dalam hal ini ASEAN) sebagai taruhannya. Akan menjadi pukulan telak bagi kepentingan ASEAN jika, misalnya, Amerika Serikat membatalkan keikutsertaannya dalam KTT Asia Timur atau KTT Asean lainnya karena tidak siap untuk duduk sejajar dengan para jenderal Myanmar. Hal ini dibuktikan dalam KTT ASEAN tanggal 27 Oktober 2021, Ketua ASEAN saat itu, Brunei, memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing karena Sebagian anggota menentang kehadirannya (CNN Indonesia, 2021).

Reputasi ASEAN juga akan memburuk. Foto demonstrasi massa nasional melawan rezim militer serta para demonstran yang dibunuh dan terluka beredar di seluruh dunia. Hal ini mencoreng citra ASEAN. Aliansi tersebut (ASEAN) telah dituduh tidak menganggap serius piagam hak asasi manusianya sendiri (Ebbighausen, 2021). Lebih lanjut lagi, perpecahan di Myanmar akan membahayakan stabilitas seluruh Kawasan ASEAN, telah dibuktikan dengan masuknya pengungsi dari Myanmar ke tempat-tempat seperti Thailand dan dalam perkembangannya akan bertambah ke negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya.

Yang masih dipertimbangkan adalah, apakah mungkin menciptakan persatuan yang diperlukan di dalam ASEAN, sehingga para jenderal Myanmar tidak dapat menghindari dialog dan menghentikan kudeta nya. Dan pertimbangan lain adalah, apakah pendekatan konfrontatif, menurut standar ASEAN, akan menjadi lebih bisa berhasil dibandingkan diplomasi diam-diam yang biasa dilakukan di masa lalu. Kedua pertimbangan tersebut saling berkaitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kudeta militer Myanmar terhadap kawasan ASEAN semakin terasa ada nya. Jika dibiarkan begitu saja mengalir seiring berjalannya waktu, hal ini tidak akan merubah situasi buruk jadi membaik, justru situasi buruk ini semakin melebar dan tidak terkendali. Masalah belum bisa

dikatakan selesai apabila kehidupan pemerintahan dan kehidupan sosial Myanmar belum kembali ke pemerintahan demokratis dalam hal ini junta militer menghentikan aksinya.

ASEAN memperkuat perannya dalam menyelesaikan krisis Myanmar dengan memprioritaskan perbaikan situasi di Myanmar yang dipandu oleh Lima Poin Konsensus dan Piagam ASEAN ketika berhadapan dengan krisis. Kamboja sebagai pemimpin ASEAN pada tahun 2022, menyoroti sentralitas ASEAN dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk berbicara dan menciptakan kepercayaan dari berbagai pihak dalam mengurangi kekerasan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

Lima poin konsensus yang telah disepakati ASEAN dan harus dipenuhi oleh Myanmar adalah, Pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, segera memulai dialog antara semua pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait (DA, 2021).

Dilihat secara ringkas, tanggapan ASEAN terlihat agak kontradiktif: menyampaikan teguran kepada pemimpin junta dan menawarkan *succour* implisit kepada NUG tetapi tanpa mengambil keputusan substantif untuk menangguk Myanmar atau membatasi kerja sama yang lebih luas. Pada akhirnya, ketegangan dalam penanganan Myanmar oleh ASEAN mencerminkan perpecahan dalam organisasi dan sifat khususnya. Meskipun Piagam ASEAN menetapkan tujuan luas organisasi dan prinsip-prinsip yang berfungsi, piagam ini tidak menawarkan pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani kudeta di negara anggota yang tidak hanya memicu ketidakstabilan domestik tetapi regional.

Kemudian, negara-negara anggota ASEAN harus menyepakati sebuah rencana dan memberikan kerangka waktu kepada junta militer untuk menjamin bahwa Lima Poin Konsensus diterapkan di Myanmar. ASEAN harus mempelajari bagaimana menerapkan konsep non-intervensi secara lebih fleksibel terhadap isu Myanmar, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN lainnya seperti pemerintahan yang baik dan penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2021, Oktober 28). *KTT ASEAN: Myanmar Tetap Anggota Tapi Harus Setop Kekerasan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211028105736-106-713517/ktt-asean-myanmar-tetap-anggota-tapi-harus-setop-kekerasan>
- Damanik, A. T. (2021, April 22). *Komnas HAM RI Sangat Khawatir dengan Krisis Politik dan Kemanusiaan di Myanmar*. Retrieved from Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: [https://www.komnasham.go.id/files/20210422-keterangan-pers-nomor-12-hm-00-\\$G5M7.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210422-keterangan-pers-nomor-12-hm-00-$G5M7.pdf)
- Ebbighausen, R. (2021, Maret 31). *Kudeta Myanmar: Sikap ASEAN yang Terpecah*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/sikap-asean-yang-terpecah-atas-myanmar/a-57052708>
- Garmabar, P. (2021). Respon Dunia Terhadap Kudeta Militer Myanmar. *Review of International Relations Volume 3, Nomor 2*, 179-188.
- isa/dea. (2021, Maret 30). *Tolak Kudeta, Buruh Pabrik Kendaraan Militer Myanmar Mogok*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210330144001-106-623878/tolak-kudeta-buruh-pabrik-kendaraan-militer-myanmar-mogok>
- KAPUR, R. (2022, March 2022). *ASEAN and Myanmar: No sign of progress*. Retrieved from theinterpreter: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-and-myanmar-no-sign-progress>
- Manurung, H. (2021). Instabilitas Politik Myanmar: Ancaman Terhadap Stabilitas Asia Tenggara. *Jurnal Studi Asia Pasifik*, 23-35.
- Reuters. (2022, February 1). *Factbox: Myanmar's post-coup crisis in numbers*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-post-coup-crisis-numbers-2022-01-31/>
- Soe Win, K. K., & Stylianou, N. (2022, Februari 1). *Myanmar: Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke 'perang saudara'*. Retrieved from Bbc News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964>
- Sullivan, D. P. (2021). Dire Consequences: Addressing the Humanitarian Fallout from Myanmar's Coup. *Refugees International*, 1-21.
- admin. (2021, February 5). *Kabar Mansinam*. Retrieved from Mengapa Sulit Bagi ASEAN Sikapi Kudeta Myanmar?: <https://kabarmansinam.com/mengapa-sulit-bagi-asean-sikapi-kudeta-myanmar/>
- Cuddy, A. (2021, February 3). *Kudeta militer pada Senin pagi dan kesaksian warga Myanmar: 'Dunia kami benar-benar terbalik dalam satu malam'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55898699>
- Hidriyah, S. (2021). Krisis Politik Myanmar dan Intervensi . *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIII, No. 6/II/Puslit/Maret.
- F.M.Iqbal, & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum Online Vol.3 No.1*
- Bland, B. (2021, October 22). *The Interpreter*. Retrieved from ASEAN muddles through on Myanmar Published Daily By The Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-muddles-through-myanmar>

- DA, A. T. (2021, June 17). 5 Poin Konsensus ASEAN, Solusi Atasi Krisis di Myanmar. *Hukum online*.
- Staff Al Jazeera. (2022, Agustus 3). *Why is the Myanmar crisis such a challenge for ASEAN?* Retrieved from AlJazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/why-is-the-myanmar-crisis-such-a-challenge-for-asean>
- Sullivan, D. P. (2021). Dire Consequences: Addressing the Humanitarian . *refugees international*, 4.
- Wardah, F. (2022, February 17). Para Menlu ASEAN Harapkan Kemajuan Pelaksanaan Konsensus Lima Poin. *Voa Indonesia*.
- Ramiz, L., & Sari, M. I. Menanti Pencapaian Baru ASEAN: Perkembangan dan Solusi atas Krisis Myanmar di Bawah Kepemimpinan Kamboja.
- Kapur, R. (2022). ASEAN and Myanmar: No Sign of Progress. Lowy Institute. Retrieved 2 March 2022, from [https:// www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-and-myanmar-no-sign-progress](https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asean-and-myanmar-no-sign-progress).